

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar 4.1

Peta Provinsi NTB



Sumber: Infontb.blogspot.com

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia dalam gugusan sunda kecil. Provinsi ini biasa disingkat NTB memiliki 10 kabupaten/kota.

1. Kondisi Geografis Nusa Tenggara Barat

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Nus Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi ntb mencapai 49.312,19km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km²

(59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%).

b. Iklim

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6°-24,5°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48-95 %

b. Letak dan kondisi Geografis

Nusa Tenggara Barat memiliki letak geografis antara barat - timur 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan utara - selatan 8° 10' - 9° 5' lintang selatan

c. Batas Wilayah

Provinsi NTB memiliki batas wilayah sebelah utara dengan: laut jawa dan laut flores dan sebelah selatan dengan: samudra Indonesia, sebelah barat dengan: selat Lombok/Prop. Bali, Sebelah Timur Dengan: selat Sape/ ropinsi NTT.

2. Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data tabel 4.1 Kabupaten/kota, luas wilayah dan jumlah kecamatan maupun jumlah desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.1
Jumlah Desa dan Kecamatan di Provinsi NTB

No	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Lombok Barat	Mataram	1.672,81	15	120
2	Lombok Tengah	Praya	1.250,03	12	112
3	Lombok Timur	Selong	2.142,78	20	105
4	Sumbawa	Sumbawa B.	6.643,68	20	135
5	Dompu	Dompu	2.391,54	8	52
6	Bima	Raba-Bima	3.475,38	14	150
7	Sumbawa Barat	Taliwang	1.849,02	5	37
8	Kota Mataram	Mataram	61,30	3	-
9	Kota Bima	Bima	222,25	3	-

Sumber: www.bpmntb.com

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah desa dan kecamatan yang ada dimasing-masing kabupaten kota di provinsi NTB. kabupaten sumbawa memiliki luas wilayah 6.643,68 dan merupakan daerah yang memiliki luas wilayah yang paling besar dibandingkan daerah lainnya dan memiliki jumlah desa yang tertinggi. Sedangkan kabupaten kota yang memiliki luas wilayah yang terendah adalah kota Matarm dengan luas wilayah 61,30 dan diikuti oleh kabupaten bima 222,25.

B. Gambaran Umum Variabel

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Tahun 2011-2016

Pemerintah provinsi NTB selalu berusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dapat tumbuh dengan maksimal seperti provinsi-provinsi yang ada di Indonesia serta dapat menunjukkan *progress* yang baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB di wilayah atau daerah tersebut. Oleh sebab itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal pemerintah daerah khususnya di provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai upaya telah dilakukan seperti pengambilan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk pembangunan di provinsi NTB. Akan tetapi keingan pemerintah dalam mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selamanya berjalan dengan mudah setiap tahunnya. Karena disebabkan oleh keterbatasan anggaran modal dalam membangun infrastruktur yang ada di provinsi NTB. Tabel 4.2 dibawah ini menunjukkan pendapatan PDRB perkabupaten/kota provinsi NTB (Miliyar) tahun 2011-2016

Tabel 4. 2

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Perkabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2011-2016 (Miliyar)

Provinsi kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KB. Lombok Barat	4,476,476	7,827,192	8,238,697	8,708,308	9,264,933	9,795,845
KB. Lombok	5,392,669	8,616,438	9,153,911	9,728,881	10,271,862	10,853,940

Tengah						
KB.Lombok Timur	7,064,001	10,173,536	10,734,563	11,249,576	11,917,457	12,535,284
KB.Sumbawa	4,640,545	7,046,786	7,500,252	7,997,178	8,511,042	8,958,630
KB.Dompu	2,326,036	3,511,426	3,688,727	3,892,993	4,132,759	4,356,010
KB.Bima	3,514,767	5,723,488	6,016,134	6,377,801	6,777,516	7,095,587
KB.Sumbawa Barat	12,993,860	10,836,577	11,218,818	11,071,628	22,925,748	24,563,159
KB.Lombok Utara	1,579,152	2,597,797	2,704,664	2,828,842	2,962,781	3,110,767
Kota Mataram	5,495,137	8,476,038	9,149,725	9,890,461	10,680,375	11,541,099
Kota Bima	1,124,691	2,062,497	2,177,543	2,305,834	2,438,561	2,579,604
Nusa Tenggara Barat	48,607,334	66,871,775	70,583,034	74,051,502	89,883,034	95,389,925

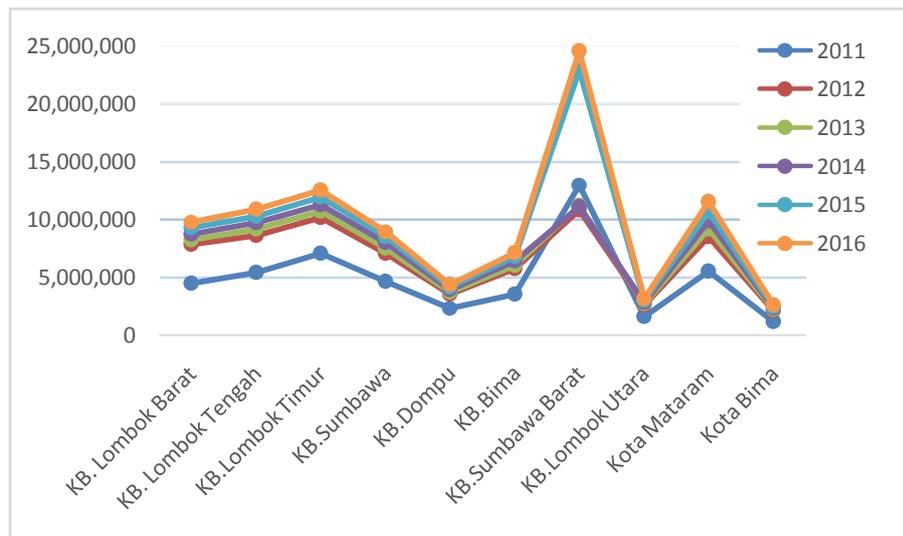
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017)

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkabupaten/kota provinsi NTB tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Berbagai aktivitas ekonomi di provinsi NTB telah berperan dalam pembentukan PDRB. Kondisi geografis dan alam menjadikan aktivitas dibidang pertanian, pertambangan dan penggalian menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi diantara bidang-bidanglainnya. Sehingga dalam struktur ekonomi provinsi NTB menurut lapangan usaha bidang-bidang tersebut mendominasi pembentukan PDRB (Badan Pusat Statistik, 2018).

Sebagai daerah tujuan wisata nasional, peranan kepariwisataan di provinsi NTB merupakan faktor yang dominan dalam pembentukan PDRB di provinsi NTB. Bisa dilihat pada tabel 4.2 dari tahun 2011-2016 pertumbuhan PDRB provinsi NTB di tahun 2011 tercatat mencapai Rp48.607.334 Milyar dan di tahun terakhir mencapai Rp95.389.925 milyar. Peningkatan PDRB tersebut tak terlepas dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Gambar 4.2

Perkembangan Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkabupaten/Kota Tahun 2011-2016 (Milyar)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah (2017)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi NTB di pengaruhi oleh beberapa sektor seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pendidikan, sektor keuangan atau asuransi, sektor industri dan sektor-sektor lainnya.

2. Kondisi Kredit untuk Modal Kerja di Setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi NTB dari Tahun 2011-2016

Kredit merupakan pinjaman yang diberikan pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan pembiayaan atau pembelian barang-barang konsumsi. Perkembangan kredit di provinsi NTB dari lima tahun terakhir terus mengalami

peningkatan dilihat dari data produk domestik regional bruto dari semua sektor jasa keuangan mengalami peningkatan. Peningkatan penyaluran kredit di wilayah NTB juga terus diikuti dengan upaya perbaikan kualitas kredit, hal tersebut tercermin dari turunnya kredit bermasalah.

Tabel 4.3
Jumlah Kredit Untuk Modal Kerja Perkabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2011-2016

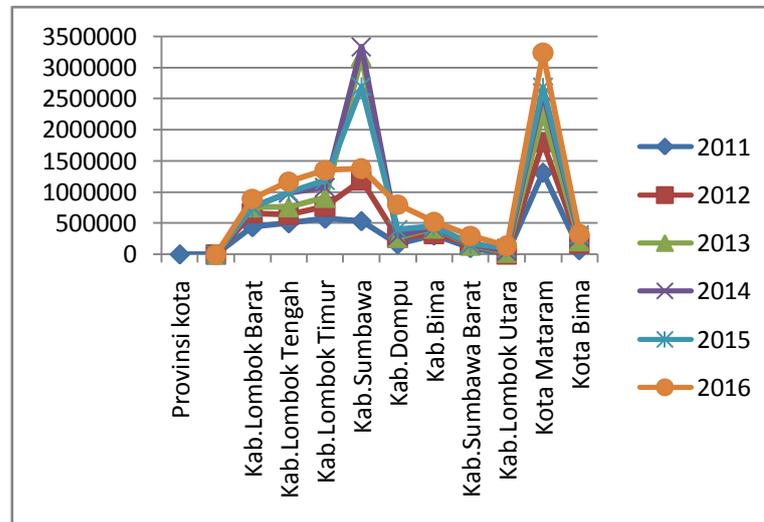
Kabupaten	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab.Lombok Barat	437,297	663,126	758,319	757,599	749,801	891,226
Kab.Lombok Tengah	499,379	640,302	758,459	981,598	1,001,435	1,168,816
Kab.Lombok Timur	572,994	768,205	909,752	1,076,190	1,188,722	1,351,814
Kab.Sumbawa	533,891	1,189,544	3,169,194	3,329,832	2,689,443	1,375,975
Kab.Dompu	161,663	271,377	267,386	295680	398,203	797,135
Kab.Bima	302,487	328,517	418,042	427420	450,804	522,685
Kab.Sumbawa Barat	101,259	155,834	143,259	151,376	167,971	300,510
Kab.Lombok Utara	0	4068	30,643	50,936	100,367	139,969
Kota Mataram	1,312,346	1,797,487	2,243,540	2,587,833	2,680,164	3,233,016
Kota Bima	67,146	180,499	215,199	281,491	320,031	327,146

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan data perkembangan kredit untuk modal kerja perkabupaten/kota di provinsi NTB dari tahun 2011-2016. Perkembangan perkreditan untuk modal di NTB tertinggi ditahun 2016 yaitu di kota Mataram dan terendah ditahun 2013 yaitu kabupaten Sumbawa Barat dan diikuti oleh kabupaten Lombok Utara, sedangkan dikabupaten/kota yang lain perkembangan perkreditan untuk modal kerja tidak terlalu mengalami tren seperti kota Mataram.

Gambar 4.3

Perkembangan Kredit Untuk Modal Kerja Perkabupaten/kota di Provins NTB tahun 2011-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah (2017)

3. Kondisi Angkatan Kerja di Setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi NTB dari Tahun 2011-2016

Pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu meningkat hal tersebut juga akan berpengaruh pada pertumbuhan jumlah angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4. 4

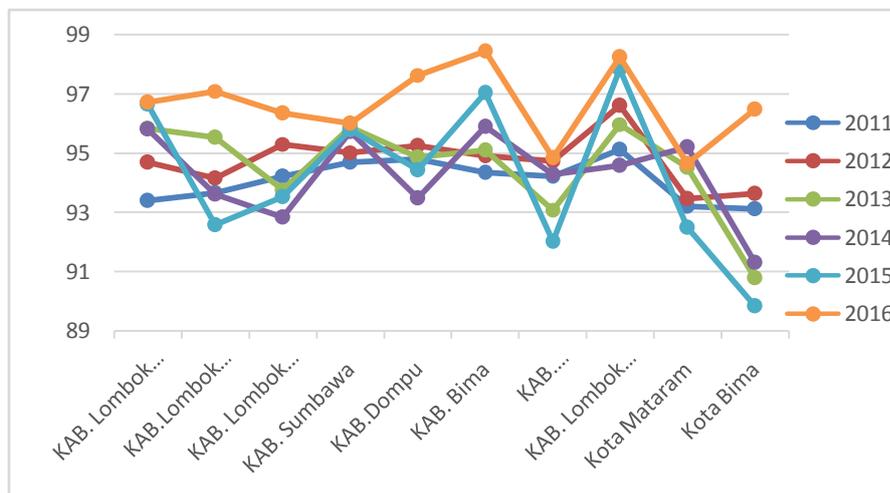
Persentase Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2011-2016

Kabupaten/kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KAB. Lombok Barat	93.40	94.70	95.84	95.81	96.65	96.72
KAB.Lombok Tengah	93.67	94.15	95.54	93.63	92.58	97.10
KAB. Lombok Timur	94.23	95.31	93.78	92.84	93.54	96.36
KAB. Sumbawa	94.70	95.03	95.89	95.73	95.80	96.02
KAB.Dompu	94.80	95.25	94.87	93.49	94.44	97.64
KAB. Bima	94.35	94.92	95.10	95.90	97.05	98.45
KAB. Sumbawa Barat	94.23	94.75	93.09	94.29	92.02	94.85
KAB. Lombok Utara	95.12	96.62	95.98	94.58	97.85	98.26
Kota Mataram	93.20	93.47	94.52	95.21	92.50	94.65
Kota Bima	93.12	93.64	90.79	91.31	89.85	96.49

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Gambar 4.4

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2011-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah (2017)

Berdasar kan gambar grafik diatas dapat terlihat bahwa pekerbangan jumlah angkatan kerja perkabupaten/kota di provinsi NTB tiap tahunnya relatif sama, akan tetapi di tahun terahir yaitu ditahun 2016 perkembangan

angkatan kerja mengalami kenaikan disetiap kabupaten/kota di provinsi NTB dan diikuti di tahun 2015 namun di tahun 2015 pertumbuhan angkatan kerja di kota Bima adalah terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di NTB. Tahun 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014 perkembangan angkatan kerja tidak terlalu mengalami tren atau kenaikan yang signifikan tetapi perkembangan yang hampir sama disetiap kabupaten/kota diprovinsi NTB. Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan kesempatan kerja yang masih terbatas.

4. Kondisi Belanja Modal di Setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi NTB dari Tahun 2011-2016

Belanja daerah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal yang bertujuan untuk membangun daerah dalam bentuk prasarana ekonomi dan sosial, yang secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan atau jumlah pengeluaran pemerintah daerah dapat diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk melihat realisasi belanja daerah perkabupaten/kota di NTB dapat di lihat di tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6

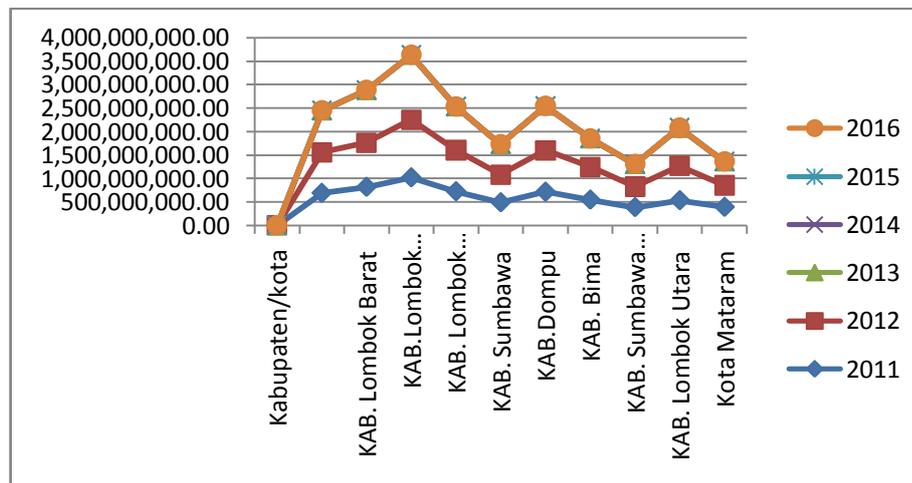
Jumlah realisasi Belanja Daerah perkabupaten/kota di NTB tahun 2011-2016

Kabupaten/kota	Tahun		
	2011	2012	2013
KAB. Lombok Barat	687,772,015	865,576,951	892,179,952
KAB.Lombok Tengah	816,650,212	948,184,383	1,114,563,725
KAB. Lombok Timur	1,019,367,681	1,232,185,688	1,377,845,193
KAB. Sumbawa	722,791,928	880,673,749	929,427,076
KAB.Dompu	487,480,263	596,625,987	644,348,845
KAB. Bima	713,634,896	882,952,999	950,856,965
KAB. Sumbawa Barat	544,775,010	697,607,158	608,433,637
KAB. Lombok Utara	385,454,705	440,391,575	478,697,446
Kota Mataram	531,936,009	731,636,969	810,748,789
Kota Bima	389,951,149	462,890,463	507,852,252
Kabupaten/kota	Tahun		
	2014	2015	2016
KAB. Lombok Barat	1,030,948,388	1,183,706,491	1,599,512,950
KAB.Lombok Tengah	1,385,758,151	1,488,365,008	1,824,001,732
KAB. Lombok Timur	1,590,493,439	1,807,801,103	2,381,210,267
KAB. Sumbawa	1,029,724,626	1,203,040,306	1,677,815,752
KAB.Dompu	720,446,234	796,544,110	1,057,587,311
KAB. Bima	1,073,722,275	1,227,776,969	1,661,934,898
KAB. Sumbawa Barat	717,671,712	710,322,877	1,136,576,498
KAB. Lombok Utara	547,027,995	606,018,675	878,514,142
Kota Mataram	1,022,456,440	1,174,887,427	1,358,971,263
Kota Bima	543,531,178	643,491,654	833,727,781

Sumber: Badan Pusat Statistika (2017)

Gambar 4.6

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah perkabupaten/kota di NTB tahun 2011-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa realisasi belanja daerah perkabupaten/kota di provinsi NTB tiap tahunnya mengalami peningkatan, dilihat dari tahun 2011 jumlah belanja daerah provinsi NTB sebesar Rp6.299.813.868 milyar dan ditahun-tahun berikutnya selalu mengalami tren atau peningkatan. Di tahun 2016 adalah jumlah belanja modal yang paling tinggi yaitu sebesar Rp14.409.852.594 milyar. Dilihat dari berkembangnya belanja modal yang tiap tahunnya selalu meningkat merupakan upaya dari pemerintah daerah provinsi NTB yang bertujuan untuk membangun prekonomian NTB dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi NTB dari Tahun 2011-2016

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari semua sektor yang ada, perkembangan pendapatan asli daerah juga akan berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin bertambahnya pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan hal itu dikarenakan usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah secara merata. Perkembangan pendapatan asli daerah perkabupaten/kota tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut biasa dilihat di tabel 4.5 dibawah ini, tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB dari tahun 2011-2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah perkabupaten/kota hingga 10 persen. Tiap-tiap kabupaten/kota pertumbuhan pendapatan asli daerahnya tidak selalu sama hal itu sebabkan oleh sektor-sektor yang berperan dalam perkembangan pendapatan asli daerah tidak bekerja secara maksimal yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti pembangunan infrastruktur ekonomi yang belum merata.

Tabel 4.5

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2011-2016

Kabupaten/kota	Tahun		
	2011	2012	2013
KAB. Lombok Barat	648,669,436,112	840,824,774,497	853,650,767,246
KAB.Lombok Tengah	823,482,380,689	943,482,026,974	1,051,205,344,987
KAB. Lombok	992,004,741,739	1,201,199,210,389	1,114,563,725,300

Timur			
KAB. Sumbawa	663,271,611,924	839,716,704,059	856,858,021,196
KAB. Dompu	461,071,426,236	564,557,915,339	603,961,149,784
KAB. Bima	690,850,547,088	838,909,224,614	921,975,995,891
KAB. Sumbawa Barat	523,837,455,534	697,607,158,000	605,031,213,186
KAB. Lombok Utara	357,023,232,109	388,877,702,790	404,818,131,965
Kota Mataram	613,908,356,328	648,862,491,019	721,899,242,989
Kota Bima	389,598,090,438	437,362,819,412	486,073,110,975
Kabupaten/kota	Tahun		
	2014	2015	2016
KAB. Lombok Barat	1,021,532,738,030	1,152,058,370,081	1,603,198,969,453
KAB. Lombok Tengah	1,225,921,118,283	1,418,951,862,876	1,833,758,150,546
KAB. Lombok Timur	1,629,156,050,506	1,821,334,863,623	2,374,972,190,918
KAB. Sumbawa	973,165,950,877	1,141,445,044,842	1,590,214,773,020
KAB. Dompu	709,954,253,977	796,309,277,897	977,982,493,673
KAB. Bima	1,032,546,100,331	1,176,977,697,504	1,639,840,142,342
KAB. Sumbawa Barat	624,403,640,000	707,394,055,738	1,073,576,498,456
KAB. Lombok Utara	488,971,566,717	574,257,579,605	841,643,230,410
Kota Mataram	864,905,445,373	1,047,078,438,286	1,307,783,709,106
Kota Bima	572,008,452,552	610,918,440,574	782,039,442,643

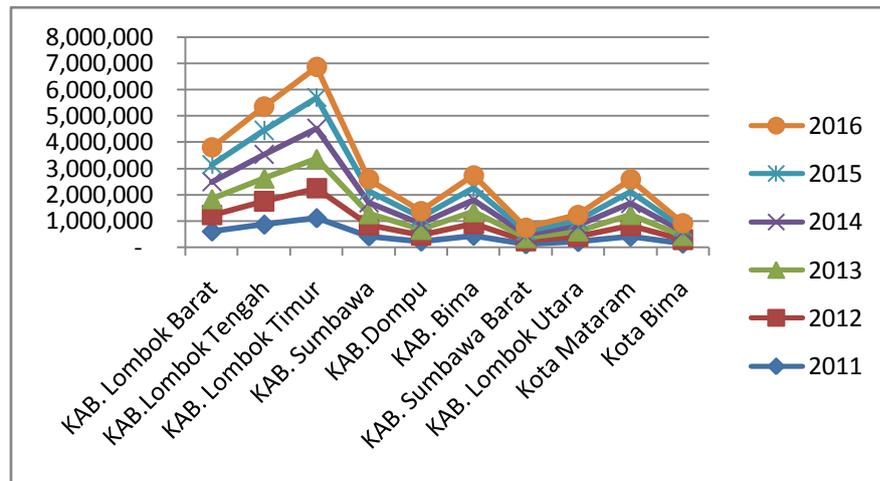
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) perkabupaten/kota jika dilihat dari tahun yang tertinggi yaitu ditahun 2016 dan kabupaten/kota yang tertinggi adalah kabupaten Lombok timur dan diikuti oleh kabupaten Lombok tengah. Lombok timur merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya tertinggi diprovinsi NTB hal itu berdampak pada pendapatan asli daerahnya yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di provinsi NTB. Perkembangan pendaptan asli daerah yang terendah berada di tahun 2011, ditahun 2011 perkembang pendapatan asli daerah

tiap kabupaten/kota tidak terlalu mengalami tren yang tiap-tiap kabupaten/kota perkembangan pendapatan asli daerah hampir sama.

Gambar 4.5

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkabupaten/kota di Provinsi NTB



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah (2017)